

Pemetaan Risiko Keamanan Nasional: Kajian Strategis Terhadap Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Nasional dalam Menangani Konflik Sosial di Wilayah Perbatasan

Qayla Latifah Hariady Majid

¹²³ Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

qaylalatifah88@gmail.com

*This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.*

ABSTRAK

Daerah perbatasan merupakan salah satu fokus utama dalam tatanan keamanan nasional, yang sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakseimbangan finansial, perdebatan yang terjadi, dan bahaya eksternal. Pertimbangan ini bertujuan untuk menganalisis pemetaan bahaya keamanan nasional dalam penanganan konflik sosial di daerah perbatasan dan menilai berbagai upaya yang telah dilakukan. Dengan menggunakan strategi subjektif dan pendekatan yang jelas, pemikiran ini menganalisis unsur-unsur konflik sosial di daerah perbatasan, kelayakan pendekatan keamanan nasional, dan prosedur yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kekokohan dan fleksibilitas nasional. Hasil dari pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa ketidakseimbangan pembangunan dan koordinasi yang kurang baik antarguru merupakan faktor yang paling memperburuk kondisi di daerah perbatasan. Oleh karena itu, diperlukan strategi pendekatan yang lebih adaptif, berbasis teknologi, dan melibatkan partisipasi masyarakat yang dinamis untuk menciptakan stabilitas yang layak.

Kata Kunci: Keamanan nasional, konflik sosial, wilayah perbatasan, pemetaan risiko, kebijakan strategis.

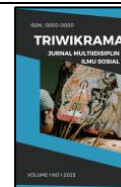
ABSTRACT

Border areas are one of the main foci in the national security order, which often face various challenges, such as financial imbalances, ongoing debates, and external hazards. This consideration aims to analyse the mapping of national security hazards in handling social conflicts in border areas and assess the various efforts that have been made. Using a subjective strategy and a clear approach, it analyses the elements of social conflict in border areas, the feasibility of a national security approach, and the procedures that can be taken to enhance national robustness and flexibility. The results of these considerations show that the imbalance of development and poor coordination among officials are the factors that most aggravate the conditions in the border areas. Therefore, a more adaptive, technology-based, and dynamic community-participation strategy is needed to create viable stability.

Keywords: National security, social conflict, border areas, risk mapping, strategic policy.

*Corresponding author

E-mail addresses: qaylalatifah88@gmail.com

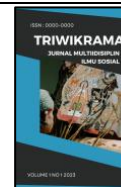


1. PENDAHULUAN

Keamanan nasional memegang peranan penting dalam menjamin stabilitas negara, terutama di wilayah perbatasan yang berisiko menimbulkan kerusuhan sipil. Mengidentifikasi risiko keamanan nasional merupakan langkah taktis yang membantu mengungkap potensi ancaman dan mengembangkan strategi yang tepat untuk mempertahankan kekuatan nasional. Wilayah perbatasan sering kali merupakan wilayah rentan yang dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, perbedaan budaya, dan berbagai insentif ekonomi yang, jika tidak ditangani secara memadai, dapat menyebabkan kerusuhan sosial. Dalam kerangka ini, langkah-langkah yang berfokus pada keamanan dan ketahanan nasional sangat penting untuk mengatasi kerusuhan sipil di wilayah perbatasan. Menggabungkan upaya diplomatik, memperkuat mekanisme pertahanan, dan membangun kapasitas penduduk lokal sangat penting untuk mendorong stabilitas yang langgeng. Tinjauan strategis ini mempertimbangkan beberapa aspek untuk mengidentifikasi risiko keamanan nasional, termasuk pendorong konflik, keberhasilan kebijakan yang ada, dan usulan strategi yang lebih fleksibel untuk mengatasi tantangan di wilayah perbatasan.

Pertahanan negara mencakup segala upaya untuk melindungi kedaulatan negara, mempertahankan wilayah, dan menjamin keselamatan segenap rakyat dari berbagai ancaman dan tantangan yang dapat menghancurkan negara dan keutuhannya. Agar suatu negara menjadi kuat, harus selalu ada keseimbangan antara penguatan kemampuan pertahanan dan sumber daya yang tangguh. Salah satu unsur penting yang memberikan kontribusi besar bagi pertahanan negara adalah sumber daya manusia. Potensi sumber daya manusia Indonesia yang sangat besar akan menjadi keunggulan yang nyata jika diintegrasikan secara efektif dalam sistem pertahanan yang terpadu. Tugas di bidang pertahanan semakin beragam, dan ancaman juga semakin beragam. Tidak dapat dipungkiri bahwa sumber daya manusia yang kompeten sangat dibutuhkan untuk mengembangkan dan melaksanakan strategi pertahanan Negara (Putro, 2022).

Konsep keamanan tidak dapat digunakan secara terpisah karena penafsirannya sangat bervariasi tergantung pada karakteristik khususnya. Karakteristik ini membantu membedakan relevansi dan pentingnya keamanan itu sendiri. Misalnya, berbagai bentuk keamanan, seperti keamanan nasional, keamanan regional, dan keamanan global, saling terkait. Keamanan regional secara alami muncul dari keamanan nasional. Keputusan keamanan nasional dapat berdampak signifikan pada stabilitas regional dan global. Lebih jauh lagi, tantangan keamanan saat ini sering kali melampaui kapasitas negara untuk menyelesaikannya sendiri. Misalnya, kerusuhan politik di satu negara dapat berdampak negatif pada negara-negara tetangga. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk terus menjaga stabilitas politik internal dan keamanan regional (Moento et al., 2020). Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat meluas ke wilayah lain. Ketika suatu negara tidak stabil, risiko keamanan lintas batas dapat muncul, termasuk pergerakan pengungsi, gangguan ekonomi, perdagangan senjata, dan infiltrasi kelompok bersenjata. Selain itu, hubungan diplomatik antar negara dapat memburuk sehingga menghambat upaya kerja sama di tingkat bilateral dan multilateral. Oleh karena itu, strategi keamanan nasional yang komprehensif harus mencakup kerja sama global, penguatan sumber daya militer dan penegakan hukum, serta pertumbuhan ekonomi yang adil untuk mengatasi kesenjangan yang dapat menimbulkan konflik. Konflik sosial muncul akibat ketegangan yang muncul akibat interaksi dalam suatu masyarakat. Ketegangan tersebut dapat berujung pada pecahnya konflik besar yang berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Contoh spesifik konflik sosial adalah konflik antara suku Dayak dan suku Madura di Poso, Ambon, dan Kalimantan. Konflik sosial dapat dipahami sebagai pertentangan antar individu dalam suatu masyarakat. Konflik sosial ditandai dengan adanya interaksi atau proses sosial yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha mengalahkan atau melumpuhkan pihak lainnya (Moento et al., 2020).



Perdana Menteri Bambang Pranowo menegaskan, ketahanan nasional adalah bangsa yang siap menghadapi ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan, serta mampu beradaptasi dan berintegrasi dalam segala aspek kehidupan. Gagasan tersebut dicontohkan oleh sila ketiga Pancasila yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya negara kesatuan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Mardhani et al., 2020) Ketahanan nasional tidak hanya mencakup upaya perlindungan dan keamanan. Akan tetapi, ketahanan nasional juga mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, di samping perlindungan dan keamanan. Hakikat ketahanan nasional yang berkelanjutan terletak pada interaksi dan keseimbangan yang harmonis antar berbagai sektor yang memungkinkan respons yang efektif terhadap berbagai ancaman internal dan eksternal. Mengingat situasi global yang semakin kompleks dan lingkungan geopolitik yang terus berubah, penting bagi bangsa untuk memperkuat strategi ketahanan nasional melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyempurnaan kebijakan pembangunan, dan pengembangan kemitraan internasional untuk menjamin kesejahteraan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional tidak hanya berperan sebagai pelindung, tetapi juga menjadi pilar penting pembangunan dan kesejahteraan nasional dalam menghadapi tantangan masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketahanan dan Keamanan Nasional

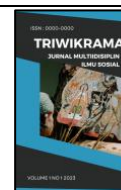
Keamanan nasional dapat menjadi sebuah konsep yang mencakup usaha suatu negara untuk mengamankan hubungan nasionalnya dari bahaya internal dan eksternal. Menurut (Hadi et al., 2024) keamanan nasional tidak hanya terkait dengan perspektif militer, tetapi juga mencakup dimensi politik, ekonomi, sosial, dan alam. Kekuatan nasional, di sisi lain, mengacu pada kapasitas suatu negara untuk menghadapi bahaya dan pengaruh yang mengganggu yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan wilayahnya. Dalam perkembangannya, ketahanan nasional juga terkait dengan pemahaman dan aktualisasi dari hakikat negara, yang pada gilirannya melahirkan keunggulan dan kualitas yang mampu menghindarkan diri dari bahaya dari pihak lain. Sebagai sebuah konsep yang energetik, kekuatan nasional akan berubah sesuai dengan perubahan situasi dan kondisi, yang tampak sebagai penyesuaian yang terus-menerus untuk memenuhi tuntutan zaman.

Dalam konteks Indonesia, tatanan keamanan nasional berlandaskan pada metodologi pertahanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan berbagai pengaturan turunannya seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan strategi keamanan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian terdahulu oleh (Hadi et al., 2024) menegaskan bahwa strategi keamanan nasional harus bersifat menyeluruh dengan melibatkan berbagai pelaku usaha, termasuk pemerintah, militer, dan masyarakat madani.

Konflik Sosial di Wilayah Perbatasan

Daerah perbatasan sering kali rentan terhadap konflik sosial karena berbagai faktor, seperti ketidakseimbangan ekonomi, perdebatan mengenai batas wilayah, identitas etnis, dan minimnya peran negara dalam memberikan layanan publik. Faktor-faktor ini sering kali diperburuk oleh kondisi geografis yang sulit diakses, infrastruktur yang kurang memadai, dan kebutuhan akan pendidikan negara yang berperan dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.

Menurut (Arman et al., 2024) konflik sosial di perbatasan sering kali dipicu oleh karakteristik pembangunan yang tidak seimbang dan keterbatasan akses terhadap sumber daya.



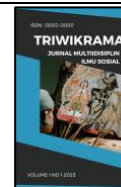
Ketidakseimbangan dalam pembangunan dan distribusi ekonomi menyebabkan kesenjangan sosial yang semakin lebar, yang pada gilirannya memicu kekecewaan di antara masyarakat perbatasan. Kerentanan atas status kepemilikan wilayah juga menjadi pemicu utama perdebatan, di mana masyarakat setempat sering kali menghadapi tantangan dalam memperoleh legalitas atas wilayah yang mereka tempati. Batas-batas suatu negara memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan muka atau pintu gerbang suatu negara. Dalam tatanan penataan ruang, batas-batas memiliki potensi yang sangat besar karena batas-batas tersebut muncul dari berbagai macam kegiatan yang terjadi di dalam batas-batas negara, baik kegiatan sosial, politik, maupun ekonomi. Hal ini biasanya menjadi salah satu alasan perlunya penataan pemanfaatan ruang. Untuk menjaga keselarasan, ruang harus ditata, dikendalikan, dan diatur sedemikian rupa sehingga dapat memberikan dampak ekonomi yang positif dan berjangka panjang bagi makhluk hidup yang hidup di dalamnya.

Dalam perkembangannya, perbedaan karakter etnis dan sosial di wilayah perbatasan dapat memicu pertikaian dalam kasus-kasus yang tidak ditangani secara hukum. Persaingan antaretnis dalam memperoleh aset atau perbedaan karakteristik dalam representasi politik dapat menimbulkan tekanan sosial. Minimnya peran negara dalam menyediakan layanan publik, seperti pendidikan, kesejahteraan, dan keamanan, turut memperparah kondisi ini, karena masyarakat di wilayah perbatasan sering kali merasa diabaikan dan kurang diperhatikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani konflik sosial di wilayah perbatasan dengan lebih memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan budaya.

Strategi Kebijakan dalam Menangani Konflik Sosial

Pendekatan utama dalam mengelola konflik sosial di zona perbatasan harus mempertimbangkan berbagai perspektif, termasuk pendekatan keamanan berbasis masyarakat, memperkuat kebijaksanaan perbatasan, dan mengoptimalkan peningkatan keuangan. Pendekatan keamanan berbasis masyarakat mencakup keterlibatan masyarakat yang dinamis dalam menjaga kesehatan sosial melalui minat pada program dan organisasi keamanan di dekatnya dengan kekuatan keamanan. Metodologi ini bertujuan untuk memperluas kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah dan mengurangi ketergantungan pada pendekatan yang hanya siap tempur. Memperkuat kebijaksanaan perbatasan juga merupakan komponen utama dalam menciptakan stabilitas di rentang perbatasan. Kebijakan yang memaksa dapat mengurangi tekanan antarnegara dan mengantisipasi konflik karena melintasi batas, yang dapat menyelamatkan keadaan sosial di dalam zona tersebut. Menyetujui (Biridlo'i Robby & Akhiruddin, 2021), negara-negara yang memiliki pengaturan perbatasan berbasis diplomasi cenderung lebih berhasil dalam mengawasi konflik dan menciptakan lingkungan yang kuat untuk partisipasi masing-masing. Perselisihan bisa jadi merupakan kenyataan hidup, tidak dapat dihindari dan seringkali bersifat inventif. Perselisihan terjadi ketika tujuan-tujuan masyarakat tidak selaras, perbedaan keputusan dan konflik biasanya dapat diselesaikan tanpa kekerasan dan seringkali menghasilkan situasi yang lebih kuat bagi sebagian besar atau semua pihak yang terlibat. Dalam setiap kelompok sosial terdapat benih-benih pertikaian yang terus-menerus antara orang-orang, kelompok dengan kelompok, orang atau kelompok dengan pemerintah. Perselisihan ini bersifat non-fisik. Akan tetapi, pertikaian dapat menimbulkan bentrokan fisik, brutal dan tidak disertai kekerasan.

Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa isu keamanan nasional dan konflik sosial di wilayah perbatasan merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Pemetaan peluang keamanan merupakan instrumen penting dalam memahami aliran risiko dan merencanakan pendekatan yang layak. Selain itu, teknik keamanan yang efektif adalah teknik yang mampu menggabungkan pendekatan militer, perdamaian, dan pembangunan



sosial-ekonomi dalam satu pengaturan koordinat. Dengan demikian, pemikiran ini mendorong analisis bagaimana metodologi pendekatan keamanan nasional dan fleksibilitas dapat dikembangkan untuk menangani konflik sosial di wilayah perbatasan secara efektif dan wajar.

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sejalan dengan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis Kajian Strategis Terhadap Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Nasional dalam Menangani Konflik Sosial di Wilayah Perbatasan. Menurut (Balaka, 2022) metode kualitatif dapat menjadi strategi yang digunakan untuk memperoleh kajian sosial dengan menyelidiki informasi dari berbagai sumber, seperti buku, artikel ilmiah, dan penelitian sebelumnya. Pertimbangan ini berupaya untuk memperoleh dan menguraikan makna dari berbagai data yang dikumpulkan, sehingga dapat menciptakan penyelidikan yang mendalam terhadap isu yang sedang diteliti. Pendekatan deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pendekatan keamanan dan kekuatan nasional dan aliran perjuangan sosial di wilayah perbatasan. Selain itu, pendekatan ini juga membuat perbedaan dalam menguji berbagai spekulasi, membuat prakiraan, dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang makna dan saran dari isu-isu yang sedang diperiksa (Ajat Rukajat, 2018). Oleh karena itu, pemikiran ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti, tetapi juga untuk mengidentifikasi desain yang dapat menjadi dasar untuk mendefinisikan teknik pengaturan yang lebih efektif.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai penelitian terdahulu. Informasi tambahan diperoleh dari buku-buku akademis, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber-sumber resmi lainnya yang penting bagi subjek penelitian. Informasi tersebut dipilih secara khusus berdasarkan signifikansi dan validitasnya dalam mendukung Kajian Strategis Terhadap Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Nasional dalam Menangani Konflik Sosial di Wilayah Perbatasan.

Pengumpulan Data

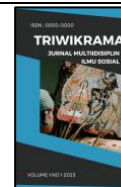
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelaah, mengenali, dan menganalisis berbagai tulisan yang terkait dengan tema penelitian. Informasi yang diperoleh dianalisis untuk menemukan pola-pola kebijakan yang telah dilaksanakan dan pengaruhnya terhadap konflik sosial di wilayah perbatasan. Selain itu, penelitian ini juga melakukan penelitian dokumen ketenagakerjaan untuk mengkaji berbagai arahan, kebijakan, dan laporan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga terkait.

Analisi Data

Informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Penelitian dilakukan dengan mengkategorikan dan menerjemahkan informasi berdasarkan subjek yang muncul dalam tulisan yang diperiksa. Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini adalah analisis substansi, khususnya dengan menyelidiki berbagai laporan dan tulisan untuk mendapatkan substansi pengaturan yang diaktualisasikan dan pengaruhnya terhadap konflik sosial. Selain itu, renungan ini juga menerapkan strategi analisis topikal untuk mengidentifikasi

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



pola dan hubungan antara pendekatan keamanan dan elemen sosial di wilayah perbatasan. Penanganan analisis dilakukan secara efisien dengan membandingkan berbagai temuan dalam tulisan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif. Dengan menggunakan analisis kualitatif yang tepat ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan temuan yang mendalam dan berkontribusi pada definisi pendekatan yang lebih efektif dalam mengelola konflik sosial di wilayah perbatasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

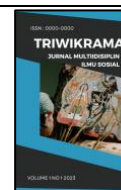
Dinamika Risiko Keamanan Nasional di Wilayah Perbatasan

Wilayah perbatasan merupakan wilayah vital yang rentan terhadap berbagai ancaman keamanan nasional. Berdasarkan survei tulisan yang telah dibahas, konflik sosial di wilayah perbatasan sering kali dipicu oleh ketimpangan ekonomi, pertikaian antaretnis, dan perbedaan karakter etnis yang tidak tertangani dengan baik. Selain itu, faktor eksternal seperti pengaruh negara tetangga dan kegiatan lintas batas yang melanggar hukum juga turut memperburuk situasi keamanan. Wilayah perbatasan sering kali memiliki kesenjangan pembangunan dibandingkan wilayah lain di dalam negeri. Keterbatasan infrastruktur, minimnya akses terhadap layanan publik, dan ketimpangan ekonomi antara wilayah pusat dan perbatasan dapat memicu kekecewaan di antara masyarakat sekitar. Kekecewaan ini sering kali berujung pada konflik sosial yang berkepanjangan jika tidak segera diatasi dengan pengaturan yang tepat.

Dalam konteks pemetaan risiko keamanan nasional, wilayah perbatasan memerlukan investigasi mendalam terhadap potensi bahaya yang berkembang. Menurut (Asyono, 2020), pemetaan bahaya dapat dilakukan melalui pendekatan berbasis data, di mana penanda seperti tingkat konflik, kedekatan pelaku non-negara, dan kelayakan pendekatan pemerintah dalam menangani masalah perbatasan harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, pendekatan keamanan yang diaktualisasikan dapat lebih difokuskan dan didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Pemetaan risiko juga harus mempertimbangkan komponen sosial dan budaya di wilayah perbatasan. Perbedaan etnis dan sosial dapat menjadi faktor yang mengikat, tetapi juga dapat menjadi sumber konflik jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memahami elemen sosial di wilayah perbatasan dan melaksanakan pendekatan yang memperkuat kohesi sosial dan mempercepat pembangunan ekonomi di wilayah tersebut.

Evaluasi Kebijakan Keamanan dan Ketahanan Nasional

Metodologi pendekatan keamanan nasional di Indonesia telah diimplementasikan dalam berbagai arah, seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan pengaturan keamanan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertahanan dan instansi terkait. Namun demikian, kecukupan pengaturan ini masih menghadapi tantangan dalam penggunaannya, khususnya dalam hal koordinasi antara pengajaran dan pemeliharaan program keamanan. Pemikiran untuk mewujudkan pengaturan keamanan yang berhasil tidak hanya berpusat pada perspektif siap tempur, tetapi juga mengutamakan pendekatan multidimensi yang mencakup kemajuan ekonomi, penguatan masyarakat, dan kebijaksanaan perbatasan. Program-program seperti kemajuan fondasi perbatasan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan perluasan bagian kekuatan keamanan dalam kecerdasan sosial dengan masyarakat sekitar merupakan variabel kunci dalam menciptakan kesehatan ekonomi. Namun demikian, masih terdapat beberapa hambatan dalam mewujudkan pendekatan ini. Menurut (Mardhani et al., 2020), tantangan terbesar dalam prosedur keamanan nasional adalah perlunya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terbatasnya kapasitas sumber daya manusia dalam mengawasi wilayah keamanan perbatasan, dan perlunya pemanfaatan inovasi dalam pemetaan bahaya



keamanan yang komprehensif. Oleh karena itu, diperlukan metodologi pendekatan yang lebih adaptif dan serbaguna terhadap unsur-unsur bahaya yang muncul.

Rekomendasi Strategi Kebijakan dalam Menangani Konflik Sosial

Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan, terdapat beberapa saran penting yang dapat diterapkan untuk memajukan kelayakan pendekatan keamanan nasional, khususnya dalam penanganan konflik sosial di wilayah perbatasan. Pemanfaatan inovasi seperti investigasi informasi spasial, false insight, dan inspeksi berbasis satelit dapat memajukan ketepatan dalam mengidentifikasi wilayah rawan konflik dan potensi bahaya keamanan. Pemanfaatan inovasi ini juga memungkinkan reaksi yang lebih cepat terhadap percepatan konflik. Selain itu, partisipasi dengan negara tetangga dalam pemantauan bentang perbatasan sangat penting untuk menghindari konflik lintas batas dan mempererat hubungan satu sama lain. Diskresi perbatasan dapat mencakup partisipasi dalam pemantauan aset bersama, pertukaran lintas batas, dan memajukan keamanan teritorial.

Di sisi lain, pendekatan yang berfokus pada memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan, penyiapan lapangan kerja, dan peningkatan kerangka kerja penting sangat penting untuk mengurangi potensi tekanan sosial. Kecukupan pengaturan keamanan nasional sangat bergantung pada energi kerja sama antara berbagai organisasi terkait, seperti TNI, Polri, Dinas Pertahanan, Dinas Dalam Negeri, dan pemerintah daerah. Lebih jauh, diperlukan komponen yang lebih mendasar dan lebih terkoordinasi untuk memastikan pendekatan yang dilakukan sesuai dengan keinginan di lapangan. Keamanan ekonomi dapat terwujud jika masyarakat terlibat secara efektif dalam persiapan. Pendekatan keamanan berbasis masyarakat memberdayakan warga setempat untuk berperan dalam memelihara solidaritas sosial, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk perbaikan dan perdamaian.

Implikasi dan Tantangan Implementasi Kebijakan keamanan

Dalam penggunaannya, metodologi keamanan nasional yang mencakup berbagai perspektif menghadapi tantangan, seperti keharusan anggaran, kebutuhan kerangka pendukung, dan kontras dalam antarmuka antara pelaku usaha yang terlibat. Selanjutnya, komitmen yang kuat dari pemerintah diperlukan dalam menunjuk aset yang memuaskan dan memberdayakan kerja sama yang dinamis dari berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan masyarakat yang ramah. Sebagai kesimpulan, pemetaan bahaya keamanan nasional harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendefinisian pengaturan keamanan dan fleksibilitas nasional. Pendekatan yang lebih komprehensif, berbasis teknologi, dan berorientasi pada masyarakat diharapkan dapat memperluas kecukupan pendekatan dalam mengelola bentrokan sosial di wilayah perbatasan. Dengan metodologi yang tepat dan koordinasi yang ideal, stabilitas nasional dapat lebih terjamin dalam menghadapi unsur-unsur bahaya yang terus muncul (Deni & Sutrimo, 2022).

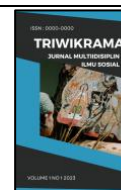
4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa wilayah perbatasan memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap berbagai ancaman keamanan, baik dari dalam maupun luar negeri. Konflik sosial di wilayah perbatasan sering dipicu oleh kesenjangan pembangunan, minimnya akses terhadap layanan publik, dan persaingan antarkelompok etnis yang tidak terkelola secara baik. Selain itu, berbagai upaya keamanan nasional yang telah dilaksanakan masih

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhruufii@gmail.com



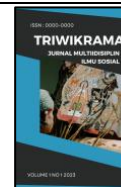
menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan anggaran, dan belum optimalnya pemanfaatan teknologi dalam pemetaan ancaman keamanan.

Pemetaan risiko keamanan nasional dapat menjadi instrumen yang sangat penting dalam memahami arus risiko dan merencanakan berbagai upaya yang lebih efektif. Upaya keamanan yang efektif adalah upaya yang memadukan perspektif militer, strategi, serta pembangunan sosial dan ekonomi secara terpadu. Dengan strategi yang tepat, upaya keamanan nasional dapat lebih fleksibel terhadap arus ancaman yang terus berkembang dan mampu mewujudkan keamanan di wilayah perbatasan.

Saran

Untuk mendorong efektivitas pengaturan keamanan nasional dalam menangani konflik sosial di wilayah perbatasan, diperlukan langkah-langkah penting yang lebih komprehensif yang didasarkan pada kebutuhan nyata di lapangan. Pemanfaatan inovasi merupakan perspektif penting dalam mendorong ketepatan pemetaan peluang. Pemanfaatan investigasi informasi spasial, adj. checking, dan artificial insights dapat membantu mengidentifikasi wilayah-wilayah yang rawan konflik dan memperkirakan potensi ancaman yang akan muncul di masa mendatang. Dengan demikian, tanggapan terhadap masalah keamanan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan berhasil. Selain itu, diperlukan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga terkait agar pengaturan yang diwujudkan lebih terkoordinasi dan tidak tumpang tindih. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan Dinas Pertahanan harus memiliki instrumen koordinasi yang jelas dan efektif dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan. Sinergi ini akan menjamin bahwa pendekatan yang diwujudkan sesuai dengan keinginan dan kondisi di lapangan.

Pendekatan keamanan berbasis masyarakat juga harus diciptakan lebih ideal. Masyarakat sekitar harus dilibatkan secara efektif dalam menjaga keamanan wilayahnya melalui program keamanan berbasis masyarakat yang bekerja sama dengan penegak hukum. Dengan demikian, keamanan di wilayah perbatasan dapat lebih terwujud karena adanya keterpaduan masyarakat dalam menjaga kestabilan lingkungan klaimnya. Dengan mengaktualisasikan langkah-langkah tersebut secara komprehensif dan wajar, pengaturan keamanan nasional dapat lebih efektif dalam menangani konflik sosial di wilayah perbatasan. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan kestabilan dan fleksibilitas nasional, tetapi juga menciptakan kondisi yang lebih aman dan sejahtera bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan



5. DAFTAR PUSTAKA

- Ajat Rukajat. (2018). PENDEKATAN PENELITIAN KUANTITATIF. In *Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Arman, Y., Klau, J., & Uruk, K. (2024). PENYELESAIAN KONFLIK PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE DALAM KONTEKS POLITIK TATA RUANG. *Journal of Law and Nation (JOLN)*, 3(4), 887-898.
- Asyono, A. H. (2020). Penguatan Reformasi Sektor Keamanan Di Wilayah Perbatasan (Border) Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 3(2), 34-46. <https://doi.org/10.7454/jkskn.v3i2.10040>
- Balaka, M. Y. (2022). Metode penelitian Kuantitatif. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, 1, 130.
- Biridlo'i Robby, U., & Akhiruddin, D. (2021). Strategi Kodim 1703/Manokwari Dalam Penanganan Konflik Sosial di Provinsi Papua Barat. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 149-158. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2841>
- Deni, D. A. R., & Sutrimo, S. (2022). Implementasi Kebijakan Daerah Dalam Menghadapi Ancaman Pertahanan Dan Keamanan Menghadapi Era Society 5.0. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(10), 3231-3240.
- Hadi, M., Rayesh, Y., Aji, G., Amalia, S., & Nurgiansah, T. H. (2024). Kasus Ambalat Sebagai Tantangan Ketahanan Nasional Bagi Indonesia. 1(1), 36-40.
- Mardhani, D., Runturambi, A. J. S., & Hanita, M. (2020). Security And Defence Dalam Studi Ketahanan Nasional Guna Mewujudkan Sistem Keamanan Nasional. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 10(3), 279. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v10i3.862>
- Moento, P. A., Wuniyu, F., & Betaubun, W. L. (2020). POLITIK KEAMANAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK SOSIAL DI PAPUA. *Jurnal Wacana Politik*, 6(1), 36-48.
- Putro, D. A. (2022). PERTAHANAN NASIONAL GUNA KEAMANAN NEGARA negara , keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan nasional yang dimilikinya , agar menjadi suatu kekuatan yang efektif (Sebastian , 2015). nasional adalah Sumber Daya Manusia . Po. IX, 345-355.